

Pembelian Sambungan hal 1

"Kalau yang jual terkait isi pulsa silakan, tapi kalau yang terkait game online itu yang harus kita tutup. Nanti kita kerja sama dengan pemilik mini-market," jelas Hadi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Surat Keputusan Presiden No 21 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Online yang dipimpin Menko Polhukam Hadi Tjahjanto. "Sampai saat ini sudah 2,1 juta situs judi online ditutup dan Satgas Judi Online dibentuk agar mempercepat pemberantasan judi online," ucap Presiden.

Hadi Tjahjanto mengatakan, Satgas Judi Online juga akan memberantas aksi jual beli rekening di pedesaan. "Kita akan melakukan peningkatan jual beli rekening. Jual beli rekening yang sudah rekan-rekan media mendengar berita itu. Ini yang akan dilakukan satu sampai dua minggu ke depan," katanya.

Hadi menjelaskan, modus jual beli rekening ini dilakukan beberapa pelaku yang sengaja masuk ke wilayah pedesaan. Mulanya, para pelaku akan melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat hingga akhirnya meminta mereka untuk membuat

rekening secara online.

Setelah rekening terbuat, rekening itu lalu diserahkan kepada pengepul rekening yang memang telah tergabung dalam sindikat tertentu. "Oleh pengepul dijual ke bandar, dan oleh bandar digunakan untuk transaksi judi online," kata Hadi.

Menurutnya, modus ini sudah sering dilakukan sehingga menyebabkan banyaknya rekening tercatat oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang terlibat dalam transaksi judi online. Karenanya, Hadi meminta Polri dan TNI untuk mengerahkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas mengantisipasi adanya praktek jual beli rekening di lingkungan masyarakat. Satgas juga akan menelusuri siapa pihak di balik sindikat praktik jual beli rekening tersebut.

Sedangkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) siap menelusuri korban judi online dari nomor rekening yang sudah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Berdasarkan laporan PPATK sudah 5.000 rekening yang diblokir terkait ju-

di online, itu saya minta untuk diperiksa," kata Menko PMK Muhadjir Effendy.

Muhadjir menjelaskan, nomor rekening yang diblokir tersebut nantinya akan ditelusuri dan datanya diperiksa apakah pemilik tercatat sebagai penerima manfaat bantuan sosial (bansos) atau bukan.

Bagi pemilik nomor rekening yang didapati menggunakannya untuk bermain judi online maka, katanya, yang bersangkutan akan ditindak secara hukum pidana oleh Satgas Judi Online. "Ditindak karena bagaimanapun tidak bisa, mereka penerima bansos lalu bisa ikut bermain judi ini," katanya.

Menko PMK menilai, dari penelusuran tersebut juga akan diketahui berapa jumlah anggota keluarga yang dianggap sebagai korban atau pihak yang dirugikan atas aktivitas judi. Keluarga yang menjadi korban itu yang akan mendapatkan pendampingan sosial, kesehatan, pemulihan finansial maupun rehabilitasi oleh Kemenko PMK bersama Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga Kementerian Kesehatan.

(Ant/San)-f

Menko Sambungan hal 1

Apakah yang pernah saya sarankan tahun lalu, sudah dipenuhi atau belum oleh para pekerja di situ," tegas Menteri.

Diaku Muhadjir, saat ini belum ada solusi mengenai tenda di Mina yang memang sangat terbatas. Ia juga sempat mengusulkan soal toilet yang dibuat beberapa lantai. "Supaya toiletnya dibuat beberapa lantai tidak satu lantai agar tak menghabiskan tempat.

Karena untuk toilet saja bisa habis banyak tempatnya, sehingga harus dinaikkan," ucap Muhadjir.

Pada bagian lain, Timwas Haji DPR juga mendapati adanya jemaah yang diusir dari tenda, akibat penempatan tenda jemaah haji Indonesia yang tidak sesuai dengan maktab yang telah ditentukan. Mereka terpaksa meninggalkan tenda karena hak-haknya tidak bisa terpenuhi karena salah tempat.

"Semestinya tidak akan terjadi kalau Kemenag bisa mengantisipasi sejak awal," ucap anggota Timwas, Wisnu Wijaya.

Salah seorang jemaah haji Dedi Karyadi dari kelompok terbang 49 asal Kota Bogor, mengungkapkan, tenda yang disediakan Pemerintah Arab Saudi hanya berukuran 10x12 meter diperuntukkan bagi 160 orang.

(Ant/Ati)-f

Judi Sambungan hal 1

bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan selama ini belum pernah tuntas. Penyelesaian masalah hanya menyentuh pada permukaan saja akan tetapi belum menyentuh pada akar masalahnya. Oleh karena itu, menganalisis permasalahan judi online hendaknya perlu didekati dengan beragam perspektif sehingga akan lebih komprehensif.

Dari perspektif struktural fungsional, maraknya judi online dapat dilihat dari pendekatan patologi sosial, perilaku menyimpang maupun disorganisasi sosial. Dari perspektif disorganisasi sosial, masalah judi online dikarenakan ada sistem sosial yang tidak bekerja misalnya lemahnya kontrol sosial keluarga, masyarakat dan kurangnya penegakan hukum dari pemerintah. Ini juga selaras jika kita mencermatinya dari perspektif perilaku menyimpang/disorganisasi sosial dimana masalah sosial ini dikarenakan ada nilai/norma yang dilanggar. Dalam norma agama maupun hukum jelas melarang perilaku judi online ini, sehingga ketika ada individu yang melanggar berarti telah terjadi masalah sosial.

Dalam perspektif yang lain, masalah judi online juga dapat dilihat dari perspektif teori risk motivation theory. Dalam perspektif ini dijelaskan bahwa munculnya perilaku pengambilan risiko sangat dipengaruhi oleh faktor personal, terutama

desirability of control (Trimpop, 1994). Desirability of control dapat memperlemah pengaruh persepsi risiko sehingga individu tetap memiliki niat untuk melakukan suatu tindakan berisiko demi mendapatkan hasil atau konsekuensi yang diinginkan. Dalam konteks perilaku judi online ini, mereka mengabaikan berbagai risiko hukuman pidana, sanksi sosial keluarga dan masyarakat demi mendapatkan keuntungan. Ketika mereka melakukan judi online ini. Mereka rela mempertaruhkan uang yang dimiliki untuk ikut serta dalam permainan judi online.

Jika ditelusuri lebih mendalam mengenai penyebab masalah judi online ini tentunya akan dipengaruhi oleh berbagai faktor misalnya Tingkat literasi digital yang rendah sehingga menyebabkan mereka terus mengalami kecanduan judi, perilaku konsumtif masyarakat digital yang mudah tergoda dengan promosi-promosi melalui dunia visual. Akar penyebab ini dapat ditarik lebih jauh karena faktor ekonomi, sehingga mereka menjadikan judi online ini sebagai jalan pintas untuk mendapatkan uang. Aspek struktural juga perlu dilacak, jangan-jangan tidak pernah tuntasnya judi online ini dikarenakan adanya beking-beking dari perilaku judi online, bahkan ada pihak-pihak yang menjadikan ini sebagai sebuah bisnis.

Bertitik tolak dari masalah sosial di

atas, maka penyelesaian masalah sosial judi online harusnya melibatkan pendekatan dari berbagai perpektif. Dari sisi individu, perlu ada literasi digital sehingga individu-individu tersebut paham mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Sosialisasi dan internalisasi kepada masyarakat menjadi penting untuk dilakukan. Dari sisi institusi, perlu ada kontrol sosial yang dibangun pada level keluarga dan masyarakat. Dalam konteks ini, perlu ada perubahan atau perbaikan sistem, terutama orientasi nilai yang lebih bersifat humanis dan menjunjung moralitas. Perlu ada sanksi-sanksi sosial yang bisa dikembangkan oleh masyarakat untuk menimalkan perilaku judi online ini misalnya dengan menciptakan budaya malu ke masyarakat. Pada aspek hukum, perlu ada perlu memperkuat regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum. Pemblokiran atas situs-situs judi online perlu rutin dilakukan. Regulasi-regulasi yang ada seringkali tertinggal dengan kejahatan-kejahatan online yang berkembang. Sinergi antar aktor dan pendekatan yang multidisiplin ini diharapkan mampu meminimalkan munculnya perilaku judi online.

(Penulis adalah Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan UGM)-d

BPRS HIK MCI Yogya Muhibah ke Malaysia



KR-Istimewa

Pegawai BPRS HIK MCI Yogya saat mengikuti muhibah ke Malaysia.

MALAYSIA (KR) - Guna melakukan penyegaran sekaligus menjalin keakraban antarpegawai, Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) HIK Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta, mengadakan employee gathering ke Malaysia. Muhibah selama tiga hari (19-21 Juni) ini diikuti 55 peserta dan mendapatkan pelatihan dari Komisaris BPRS HIK Prof Edy Suandi Hamid di Resto Jom My Seafood Kuala Lumpur.

Dirut BPRS HIK Kholid MM menyatakan, kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan kinerja karyawan, dan terus meneguhkan posisi HIK MCI sebagai BPRS terbesar di DIY. BPRS HIK MCI didukung permodalan dari jaringan dari Dana Pensiun Muhammadiyah, serta bagian dari holding di bawah Grup Harta Insan Karimah (HIK) yang menangani 9 BPRS di beberapa kota di Tanah Air.

Dalam kegiatan ini manajemen dan karyawan BPRS HIK MCI mengunjungi

destinasi Putra Jaya, Genting Higlands, Batu Caves, KLCC, Istana Negara, dan objek kultural lainnya. "Kegiatan ini kami adakan agar semua staf bank punya wawasan global dengan melihat negeri tetangga," kata Kholid didampingi Komisaris Utama Dede Harris Sumamo SE MM, Komisaris Prof Edy Suandi Hamid, serta Dewan Pengawas Syariah Dr Ahim Abdurahim dan Toto Suparwoto SPd.

Menurutnya, bank dengan visi 'Terwujudnya Bank Syariah yang Unggul dan Terpercaya' ini asetnya terus bertumbuh. Pada 2016 aset perusahaan hanya Rp 33 miliar, dan per 31 Desember 2023 telah meningkat menjadi Rp 267 miliar. "Ditargetkan tahun ini aset perusahaan bisa melampaui Rp 300 miliar," ujar Direktur Mushonifil Agustian SE.

Dikatakan, perkembangan BPRS HIK MCI tidak lepas dari penerapan tatakelola yang profesional didukung sumber daya terlatih dan memiliki kompetensi tinggi.

(Ria)-d

Saksi Sambungan hal 1

Namun demikian, Kasdi mengaku tidak mengetahui lebih lanjut apakah uang tersebut benar diterima oleh Komisi IV DPR RI. "Tetapi ada tanda terimanya kalau Hatta yang menerima uang itu," tuturnya.

Selain memberi uang untuk THR anggota Komisi IV DPR, Kasdi juga mengungkapkan adanya arahan dari SYL untuk menyerahkan uang sebesar Rp 800 juta kepada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firi Bahuri. "Pak Hatta memperjelas bahwa ada kebutuhan Rp 800 juta yang akan diserahkan kepada Pak Firi. Info yang saya terima itu untuk kepentingan Pak Firi," ujarnya.

Sebelum permintaan uang itu, Kasdi menuturkan SYL sempat mengumpulkan para pejabat eselon I Kementan untuk memberikan arahan agar mengantisipasi

penyelidikan KPK mengenai pengadaan sapi yang bermasalah di Kementan. "Lantas kemudian arti mengantisipasi itulah maka ada sharing dana lagi dari para pejabat Kementan," tambahnya.

Kasdi menjelaskan berdasarkan informasi yang diterima dari Hatta, uang sebesar Rp 800 juta tersebut diserahkan kepada Firi Bahuri melalui Kepala Polrestabes Semarang Komisaris Besar Polisi Iwan Anwar yang juga merupakan saudara dari SYL. Namun demikian, Kasdi mengaku tidak mengetahui lebih lanjut alasan pemberian uang kepada Firi itu diserahkan melalui Kapolrestabes Semarang. "Yang saya tahu intinya uangnya sudah diserahkan ke Pak Irwan, tetapi saya tidak tahu sudah diserahkan ke Pak Firi atau belum," ucapnya.

(Ant/Has)-f

Kusnadi Sambungan hal 1

Sementara Kusnadi mengaku pernah bertemu dengan Harun Masiku yang kini menjadi buronan KPK. "Pernah," katanya usai menjalani pemeriksaan. Namun Kusnadi mengatakan dirinya tidak pernah berkomunikasi dengan Harun Masiku melalui ponsel. Hal itu disampaikan saat ditanya wartawan apakah penyidik KPK juga mengonfirmasi



Usai Sambungan hal 1

Disampaikan Widi, Masjidil Haram saat ini juga kondisinya padat jemaah dari berbagai belahan dunia yang akan tawaf ifadhah. Oleh karena itu, jemaah harus mempertimbangkan kondisi kepadatan Masjidil Haram.

Ia menyampaikan, tawaf ifadhah dilaksanakan setelah bus shalawat yang akan mengantar jemaah dari hotel ke Masjidil Haram dan sebaliknya kembali beroperasi.

(Jon/Ati)-d

Prakiraan Cuaca Kamis, 20 Juni 2024

Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Steman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95

☀️ Cerah ☁️ Berawan 🌧️ Udara Kabur 🌧️ Hujan Lokal 🌧️ Hujan Petir

Gratis : Aiko

Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Ekonomi Kreatif Bagi Generasi Muda Bangsa

Dr Ismadiyah Purwaning Astuti, SE MSc
Dosen Prodi Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta

GENERASI muda mempunyai peran yang sangat penting dalam kemajuan ekonomi bangsa Indonesia dan memegang peran penting sebagai motor penggerak ekonomi dimasa depan. Generasi muda harus

disiapkan sejak dini melalui peningkatan keahlian dan ketrampilan sehingga dapat bersaing tidak hanya dengan sumber daya dalam negeri tetapi juga dengan negara lain. Peningkatan keahlian dan ketrampilan digunakan untuk menanggulangi salah satunya permasalahan bonus demografi antara tahun 2020-2045. Bonus demografi merupakan suatu kondisi dimana usia produktif antara 15-64 tahun mencapai 70 persen dari total penduduk Indonesia. Bonus demografi dapat menjadi berkah untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat apabila lapangan pekerjaan tersedia bagi Masyarakat tetapi dapat menjadi permasalahan yang besar apabila bonus demografi tidak dimanfaatkan secara

baik.

Tantangan ekonomi lain yang saat ini terjadi adalah munculnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015. MEA menimbulkan persaingan ekonomi di ASEAN semakin ketat karena terjadi kebebasan lalulintas input dan output baik barang, jasa, investasi dan modal. Penghilangan hambatan masuk dan keluar baik input dan output yang tidak diikuti dengan peningkatan produktifitas sumber daya manusia di Indonesia akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini mengharuskan masyarakat Indonesia mempunyai sumber daya manusia yang produktif sehingga dapat bersaing

dengan negara lainnya melalui pendidikan yang lebih tinggi, peningkatan keahlian, dan ketrampilan. Selain itu, sumber daya manusia di Indonesia harus dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia menjadi produk yang lebih berdaya guna dan dapat bersaing dengan produk dari negara lain.

Generasi muda yang sangat perlu dikembangkan jiwa kewirausahaan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jiwa kewirausahaan seperti tanggung jawab, tidak mudah menyerah, tangguh, dan kreatif merupakan kepribadian yang harus dimiliki. Selain itu, generasi muda juga disiapkan untuk bisa mandiri menciptakan usaha sendiri sehingga tidak

bergantung kepada orang lain atau pemerintah. Kewirausahaan merupakan kegiatan atau aktifitas yang berdasarkan keinginan, bakat dan kemampuan dalam mengenali produk baru, menentukan tatacara dalam produksi, menyusun manajemen operasi, memasarkan produk serta mengatur pemodal dan pengelolaan keuangan. Orang yang mempunyai peran dalam kegiatan kewirausahaan disebut dengan wirasaha. Seorang wirasaha harus tangguh melakukan sesuatu dan mempunyai semangat untuk mengembangkan produk dan mensejahterakan dirinya sendiri dan orang lain. Kewirausahaan merupakan hasil dari latihan dan praktek. Jiwa kewirausahaan

harus ada pada generasi muda sehingga diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan negara dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Kewirausahaan diharapkan tidak hanya sekedar membuat usaha tetapi juga berbasis pada ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan konsep baru untuk mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama.

Ekonomi kreatif erat kaitannya dengan kreatifitas sehingga tidak terlepas dari kemampuan sumber daya manusia dalam mengolah bahan baku atau input secara efisien menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dengan menggunakan inovasi dan teknologi.

Ekonomi kreatif mampu memajukan ide, seni dan inovasi berbasis teknologi dan budaya sehingga dapat memperkaya identitas dan khasanah Bangsa Indonesia. Generasi muda diharapkan berjiwa kewirausahaan berbasis ekonomi kreatif. Hal tersebut dapat merubah pola pikir generasi muda dari mencari pekerjaan menjadi pencipta lapangan pekerjaan baru sehingga tercipta kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park